

PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

TRI JOKO WALUYO

FISIP Universitas Riau

Abstrak

Partai Politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi sarana bagi calon kepala daerah untuk proses penyeleksian dan pencalonan serta mesin politik yang diharapkan memenangkan sebagai kepala daerah. Dalam upaya memenangkan calon kepala daerah menunjukkan bahwa tidak semua koalisi partai politik berupaya maksimal meraih dukungan suara di tingkat pendukungnya, karena bersikap setengah-setengah. Partai politik tak ubahnya seperti perahu politik dalam pencalonan kepala daerah yang membiarkan calon kepala daerah berjuang sendirian. Bahkan di Kota Pekanbaru, partai politik dianggap gagal dalam mencalonkan kepala daerah dari kader-kader parpol sendiri dan koalisi parpol hanya untu kepentingan sementara tanpa mempertimbangkan palatform ideologi yang dinutnya.

Kata Kunci : Kader Parpol, Penyeleksian, Pencalonan.

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah bisa menolong maupun menyulitkan rakyat; memungut pajak dari beberapa penduduk tetapi tidak dari yang lain; memberi subsidi kepada beberapa penduduk tetapi tidak pada yang lain; menerima pegawai baru dan memecat yang lain; memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan bantuan-bantuan lain yang menguntungkan beberapa kelompok warganegara tetapi tidak bagi yang lain, dan sebagainya. Pendeknya, kepentingan rakyat – kebutuhan, keinginan, nilai-nilai dan harapan mereka bisa dipenuhi tetapi bisa juga dikecewakan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu, warganegara sangat memperhatikan dan berkepentingan dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintahnya. Mereka menyatakan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.

Setiap sistem politik memiliki cara-cara tertentu merumuskan dan menanggapi tuntutan. Bentuk artikulasi kepentingan yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintahan, atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau ketua suku. Kelompok kepentingan yang dibentuk untuk lebih memperkuat dan mengefektifkan tuntutan-tuntutan individual itu telah ada dan aktif dalam kehidupan politik sepanjang sejarah. Selama seratus tahun terakhir ini, ketika masyarakat mengenal industrialisasi dan ruang lingkup kegiatan pemerintahan meluas, jumlah dan jenis kelompok kepentinagn itu tumbuh dengan pesat.

Walaupun kelompok kepentingan yang terorganisir tidak mudah dibedakan dari partai politik, ada satu perbedaan yang nampaknya secara umum diterima. Suatu kelompok kepentingan adalah “setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa, pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik”. Sebaliknya, partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan-jabatan public, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan, walaupun dalam hal beberapa partai revolusioner ini mungkin berujud penghancuran pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan yang ada dan pembentukan jabatan “public” yang baru. Kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa, kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung.

Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintahan.

Dalam praktek memang perbedaannya tidak setegas itu. Keanggotaan kelompok kepentingan dan keanggotaan partai politik sering tumpang-tindih, dan lebih-lebih lagi, kelompok kepentingan sering sangat terlibat dalam penSeleksian calon-calon partai dan selalu berusaha agar anggota-anggotanya terwakili dalam komisi-komisi pemerintah. Kadang-kadang pula, kelompok kepentingan itu bahkan berkembang menjadi partai politik, misalnya Partai Buruh Inggris berasal dari gerakan serikat buruh. Tetapi, walaupun bedanya tidak jelas, satu perbedaan utamanya adalah usaha penguasaan jabatan publik itu.

Perilaku Politik dan Pemilukada

Perilaku politik merupakan salah satu substansi pokok dari studi politik. Dalam hal ini politik selalu berhubungan dengan masalah-masalah nilai (values), norma-norma (norms) dan simbol-simbol (symbols) yang hidup dalam masyarakat¹. Oleh karena itu, perilaku politik, yaitu perilaku yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, tidak dapat terlepas dari keseluruhan perilaku individu-individu dalam masyarakat.

Perilaku politik masyarakat akan sangat ditentukan oleh sistem politik yang berlaku di suatu negara. Pada masa-masa akhir ini, sistem politik demokratik telah dipandang dan diakui sebagai sistem politik yang tepat untuk terwujudnya suatu partisipasi politik masyarakat secara luas dalam proses pembuatan keputusan politik.

Dalam negara dengan sistem politik demokratik, perilaku politik warga negara diantaranya dalam bentuk partisipasinya dalam pemilihan umum, yaitu kegiatan memberikan suara kepada calon-calon yang diajukan oleh partai-partai politik, yang diajukan secara periodik untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan. Dalam hal ini Powel mengemukakan sebagai berikut: “participation by citizens in competitive elections is distinctive feature of democratic politics”².

Pemilukada Kota Pekanbaru

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat daerah, diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai-partai politik atau berasal dari calon independen. Pemilihan kepala daerah kota Pekanbaru akan dilaksanakan pada 18 Mei 2011. Pemilihan kepala daerah langsung ini diikuti oleh dua pasang calon, yaitu pasangan nomor urut satu, Firdaus – Ayat Cahyadi, didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Demokrat (PD), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sedangkan pasangan nomor urut dua adalah pasangan Hj. Septina – Erizal Muluk, yang didukung oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).

¹ Charles F. Andrain, Political Life and Social Change An Introduction to Political Science, Pub. Comp Belmot., Cal. Wadsworth, 1970, p. 55.

² G. Bingham Powell, Jr., Contemporary Democracies Participation, Stability and Violence, Harvard University Press, Cambridge, London, 1982, p. 12.

Tulisan ini akan memaparkan gambaran kritis fungsi dan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah langsung di Kota Pekanbaru. Secara teoritik dan konseptual, fungsi partai politik akan dipaparkan pada awal tulisan. Selanjutnya akan dianalisa sejauh mana fungsi-fungsi partai politik tersebut diperankan oleh partai politik pada pemilihan kepala daerah langsung kota Pekanbaru.

Telah sampai pada suatu aksioma bahwa tidak ada sistem politik yang dapat bertahan tanpa partai politik kecuali pada masyarakat tradisional dan beberapa masyarakat transisional. Partai politik telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik dan merupakan alat untuk memperoleh kekuasaan serta untuk memerintah⁹. Ia merupakan paket dari kehidupan demokrasi¹⁰.

Di dalam memberikan pengertian mengenai partai politik, para ahli melakukannya melalui berbagai pendekatan. Misalnya, Edmund Burke menerangkan partai politik dari aspek tujuan pembentukan partai, Leon D. Epstein mendekati pengertian partai politik dari aspek karakteristiknya demikian pula Giovanni Sartori. Sedangkan Maurice Duverger mendekati pengertian partai politik melalui struktur keanggotaan partai. Dan masih banyak ahli lainnya, seperti Samuel J. Eldersveld yang membicarakan partai politik dari aspek tingkah laku suatu kelompok sosial, dan yang lain-lain.

Pengertian partai politik dari para ahli tersebut di atas lebih lanjut diuraikan sebagai berikut. Dari aspek tujuan pembentukan partai politik, Edmund Burke mengemukakan bahwa partai politik adalah “..... a group of man who had agreed upon a principle by which the national interest might be served (partai politik tidak lain merupakan sekelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip-prinsip tertentu untuk mengabdikan dan melindungi kepentingan nasional)”¹¹

Dari aspek karakteristik, Leon D.Epstein¹² mengemukakan bahwa “political party is any group, however loosely organized, seeking to elect governmental office-holders under a given label”. Dari sini nampak bahwa partai politik menunjukkan pada satu kelompok yang mengejar kedudukan pemerintahan, yang bersama-sama terikat pada identitas atau label yang dimilikinya. Dengan identitas yang dimilikinya itu partai politik setidaknya akan menunjukkan karakteristiknya, baik yang menyangkut besarnya, tingkat integritasnya ataupun jumlahnya.

Sartori¹³, hampir senada dengan Epstein, mendefinisikan partai politik seperti berikut:

“A party is any political group identified by an official label that presents at elections, and is capable of placing through elections (free or non free), candidates for public office”

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa partai politik ialah suatu kelompok politik yang memiliki identitas tertentu, yang berusaha memenangkan pemilihan umum, bebas ataupun tidak bebas, untuk menempatkan calon-calonnya dalam jabatan pemerintahan.

Sementara itu Maurice Duverger¹⁴ mengetengahkan suatu uraian tentang partai politik dengan menekankan bahwa mencari perbedaan karakteristik partai-partai politik itu sendiri

⁹ Iclasul Amal, Teori-teori Mutakhir Partai Politik, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988, h. 18

¹⁰ Bert F. Hoselitz (ed.), Panduan Dasar Ilmu Ilmu Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, h. 324.

¹¹ Edmund Burke, dalam Carlton Clymer Rodee, et.al., 1976, Introduction to Political Science, p. 317, Tokyo: Mc Graw-Hill Kogakusha.

¹² Lihat Michael G. Roskin, et.al., 1988, Political Science, An Introduction, p. 214, Third Edition, Prentice Hall Engelwood Cliffs, New Jersey.

¹³ Giovanni Sartori, 1984, Parties and Party Systems A Framework for Analysis, p. 63, Cambridge University Press, New York.

bisa dilakukan dengan melihat struktur dan anatomi masing-masing partai politik. Mencari karakteristik partai-partai politik bisa dilakukan dengan meninjau segi organisasi, keanggotaan, maupun aspek kepemimpinannya.

Dengan cara tersebut Duverger mencoba mengklasifikasikan partai-partai politik berdasarkan “direct structure” dan “indirect structure”. Struktur yang pertama keanggotaan seseorang dalam partai politik semata-mata dilihat sebagai individu-individu yang secara langsung masuk dan mengikatkan diri dalam partai tertentu. Sedangkan struktur yang kedua, keanggotaan seseorang dalam suatu partai politik diperoleh berdasarkan keikutsertaannya dalam organisasi yang bernaung di bawah suatu partai. Contoh keanggotaan partai politik tidak langsung ini dapat dilihat di Indonesia sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dimana hampir semua partai politik memiliki organisasi onderbouw pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti buruh, tani, nelayan dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan karakteristik keanggotaan, Duverger membedakan antara partai-partai kader (cadre party) dengan partai massa (mass party). Proses seleksi keanggotaan dalam partai kader dilakukan dengan sangat ketat dan memperhatikan berbagai aspek, seperti keterampilan, prestise, pengalaman politik serta bobot pengaruhnya yang diharapkan bisa menarik pendukung-pendukung dalam pemilihan umum. Partai massa cenderung mendapatkan jumlah anggota yang sebanyak-banyaknya dengan elite kepemimpinan yang diseleksi secara ketat.

Seorang ahli lainnya, Samuel J. Eldersveld¹⁵ membicarakan partai politik dari aspek tingkah laku suatu kelompok sosial dengan menariknya ke dalam aktivitas terpola menurut bentuk matriks sosial. Jika diinterpretasikan sebagai suatu organisme sosial, maka partai politik tidak memainkan peranan sebagai individu-individu di dalam suatu unit sosial yang bisa ditetapkan untuk kemudian bisa menerima dan mencoba menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu yang bersifat lebih khusus. Di samping itu partai politik bisa dipandang sebagai sistem politik miniatur dalam suatu struktur kekuasaan, pola-pola distribusi kekuasaan, proses perwakilan dan sistem pemilihan maupun dalam aktivitas pengambilan keputusan.

Untuk penegasan lebih lanjut mengenai pengertian partai politik, berikut dikemukakan beberapa batasan pengertian partai politik oleh beberapa ahli.

Meriam Budiardjo¹⁶ mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Dilanjutkannya bahwa tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijaksanaan mereka.

Carl J. Friedrich¹⁷ mengemukakan :

“A political Party is a group of human being, stably organized with the objective of securing or maintaining for it’s leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages”.

Ahli lainnya, Sigmund Neumann¹⁸, menulis sebagai berikut :

¹⁴ Maurice Duverger, 1984, Partai Politik dan Kelompok Kepentingan, h. 61, Terjemahan Laila Hasyim, Bina Aksara, Jakarta

¹⁵ Samuel J. Eldersveld, 1964, Political Parties A Behavioral Analysis, p. 23, Chicccago : Rand Mc Nally & Co.

¹⁶ Meriam Budiardjo, 1982, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 160-161, PT. Gramedia, Jakarta

¹⁷ Carl J. Friedrich dalam Meriam Budiardjo, Ibid., h. 161.

“A political party is the articulate organization of society’s active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who complete for popular support with another group of groups holding divergent views”.

Seharusnya, partai politik berkembang untuk mewakili rakyat, mempengaruhi pergantian kepemimpinan politik baik lokal maupun nasional secara teratur dan damai, menyediakan akses bagi keanekaragaman yang ada serta menyadarkan akan arti pentingnya politik dengan segala konsekuensi dan tanggung jawabnya²⁰.

Dari berbagai pengertian dan rumusan yang telah dikemukakan dapat dikatakan bahwa partai politik pada dasarnya berhubungan dengan perjuangan mendapatkan kekuasaan dalam masyarakat atau negara. Dengan demikian partai merupakan organisasi dari orang-orang yang mempunyai pandangan yang sama, berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai politik, pembicaraan selanjutnya difokuskan pada fungsi partai politik. Fungsi partai politik pada dasarnya meliputi ; pertama, sosialisasi politik, yaitu membimbing proses penanaman dan penyebaran nilai-nilai dan norma-norma politik. Kedua, partisipasi politik, yaitu memobilisasi warga negara kedalam kehidupan dan kegiatan politik. Ketiga, rekrutmen politik, yaitu memilih dan menunjuk pejabat-pejabat politik dan pemerintahan. Keempat, komunikasi politik, yaitu menyampaikan informasi, issue dan gagasan politik. Kelima, artikulasi kepentingan, yaitu membuat dan menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah. Keenam, agregasi kepentingan, yaitu merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintahan. Dan ketujuh, pembuatan kebijaksanaan²¹.

Pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk partisipasi politik masyarakat, sangat ditentukan oleh sistem kepartaian yang berlaku. Sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia pada dasarnya adalah sistem multi partai, yaitu suatu sistem politik dengan lebih dari dua partai. Peran partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsinya pada pemilihan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru dapat dikatakan belum dijalankan secara maksimal. Kegiatan partai politik yang menonjol adalah hanya pada usaha mereka untuk memperoleh kekuasaan, dalam kasus pemilihan kepala daerah, mencari figur dan beramai-ramai berkoalisi mendukungnya.

Fungsi sosialisasi politik, yaitu membimbing proses penanaman dan penyebaran nilai-nilai dan norma-norma politik, hamper tidak dijalankan oleh partai-partai politik. Masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai tentang nilai-nilai dan norma-norma politik dari berbagai media yang dilakukan oleh partai politik, kecuali melalui simbol tanda gambar, dan orasi-orasi teknis pada masa kampanye menjelang pemilihan umum. Pada umumnya, partai politik juga tidak melakukan sosialisasi, bahkan, tentang jati dirinya. Masyarakat hanya mengenal partai politik dari nama partai, tanda gambar partai dan figur-figur tertentu. Kondisi ini menjadikan masyarakat tidak bisa membedakan secara memadai karakteristik partai-partai politik, yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menentukan pilihan dan dukungan mereka pada pemilihan umum.

¹⁸ David E. Apter, 1985, Pengantar Analisa Politik (Terjemahan), h. 352, LP3ES, Jakarta.

²⁰ Ichlasul Amal, 1988, Op. Cit., h. XIV

²¹ Lihat Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, 1989, Perbandingan Sistem Politik, h. 64 – 69, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Peran Partai Politik dalam Pemilukada Pekanbaru

Dalam pemilihan kepala daerah kota Pekanbaru, sampai saat ini, partai-partai politik tidak melakukan sosialisasi prinsip-prinsip yang mereka jadikan argumen mengapa mendukung pasangan tertentu dan mengapa melakukan koalisi beramai-ramai mendukung pasangan tertentu. Kalau partai politik tidak melakukan sosialisasi tentang hal-hal tersebut, dapat dipastikan bahwa partai politik hanyalah akan menjadi aksesoris dalam kehidupan demokrasi dan tidak akan pernah diperhitungkan oleh masyarakat pemilih dalam mempertimbangkan penetapan pilihan mereka pada pemilihan umum.

Fungsi partisipasi politik, yaitu memobilisasi warga negara ke dalam kehidupan dan kegiatan politik, masih belum dijalankan secara maksimal. Kegiatan memobilisasi warga negara, masyarakat pemilih, ke dalam kehidupan dan kegiatan politik memiliki arti bahwa partai-partai politik mengupayakan agar masyarakat ikut serta dalam mempengaruhi proses-proses pembuatan keputusan politik. Keikutsertaan masyarakat bisa dalam berbagai bentuk dan berbagai cara, seperti mengikuti rapat-rapat, berdemonstrasi, menulis opini, menyampaikan kehendaknya melalui surat dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan proses pemilihan kepala daerah kota pekanbaru, partai politik beserta mitra koalisinya memobilisasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kampanye. Namun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut lebih berupa kegiatan monolog yang tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kehendak dan keinginannya. Materi yang disampaikan hanyalah hal-hal umum yang bersifat normatif, sehingga materi kampanye dari para calon relatif sama, sulit untuk dicermati karakteristiknya, yang mengemuka hanyalah janji-janji yang umum dan normatif.

Fungsi selanjutnya dari partai politik adalah, rekrutmen politik, yaitu memilih dan menunjuk pejabat-pejabat politik dan pemerintahan. Fungsi rekrutmen politik menjadikan partai politik sebagai sumber calon pejabat, calon pemimpin pemerintahan. Konsekuensi dari fungsi ini adalah partai politik harus memiliki ideologi yang tegas yang mampu menarik setiap warga negara yang memiliki kecocokan ideologi untuk bergabung dan bersama-sama berupaya memenangkan pada setiap pemilihan sehingga ideologi tersebut dapat diaplikasikan.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun ini partai-partai politik gagal memunculkan calon kepala daerah yang berasal dari kader partai politik. Baik Septina Primawati maupun Firdaus bukanlah kader partai politik. Sudah dapat diperkirakan bahwa mereka tidak akan memiliki visi ideologis yang sama dengan partai-partai politik pendukungnya. Koalisi partai politik pendukung, baik koalisi partai politik pendukung Septina Primawati maupun koalisi partai politik pendukung Firdaus, keduanya bersifat instan dan rapuh dari segi ideologi. Koalisi pendukung Septina yang terdiri dari Partai GOLKAR, PPP, PKB, PAN dan GERINDRA bukanlah partai-partai yang memiliki visi ideologis yang sama atau hampir sama. Atau, mungkin, partai-partai politik tersebut tidak memiliki visi ideologis sehingga menjadi lentur dan bisa dengan siapa saja, tetapi juga dengan mudah bubar kapan saja. Demikian juga koalisi partai politik pendukung Firdaus, yang terdiri dari PKS, PD, PBB, HANURA, PDK dan PDIP bukanlah partai-partai politik yang memiliki visi ideologis yang sama atau hampir sama.

Dari segi slogan-slogan yang coba dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat dari kedua kubu, bukanlah slogan-slogan yang mengandung aspek menuju perubahan revolusioner, bukanlah slogan-slogan yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan yang membedakan dari kedua kubu. Kedua kubu menunjukkan slogan-slogan yang sama, mirip, dan dimiliki oleh semua. Kubu Septina, misalnya, "Berseri Membangun Negeri untuk Semua", sementara kubu Firdaus, "PAS menjadikan Pekanbaru Lebih Baik". Slogan yang dikemukakan oleh kubu Septina pasti diiyakan oleh kubu Firdaus, dan demikian

sebaliknya, slogan yang dipakai oleh Firdaus juga pasti tidak ditolak oleh kubu Septina. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kedua kubu tidak memiliki visi ideologis yang berbeda, akibatnya siapapun yang memenangkan pertarungan tidak akan terjadi perubahan apa-apa kecuali usaha menjadikan lebih baik dari yang lalu, dan akan lebih bertumpu pada mesin birokrasi yang telah ada.

Kondisi demikian, salah satu penyebab utamanya adalah kegagalan partai politik dalam menentukan visi ideologis, koalisi partai-partai politik yang instan dan lentur dalam mendukung calon pada pemilihan kepala daerah, dan kegagalan partai politik dalam menghasilkan kader terbina untuk didukung menjadi calon pejabat. Sebagai konsekuensi hal tersebut adalah partai politik melakukan rekrutmen calon pejabat secara instan dari luar dan bukan dari kader partai yang telah terbina dan terlatih.

Dari peran partai-partai politik yang menjadi lembaga utama memproses munculnya kepala daerah baru di kota Pekanbaru tahun ini dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, terlihat bahwa mereka berperan minimalis dan pragmatis. Peran seperti ini dipastikan tidak akan memunculkan pemimpin baru yang mampu melakukan perubahan-perubahan revolusioner. Pemimpin baru yang muncul hanyalah pemimpin baru yang melanjutkan secara sama dan sebangun dengan pejabat sebelumnya, dengan bertumpu pada birokrasi, siapapun pemenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abar, A.Z. 1990. Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru. Solo : Ramadhani.
- Abas, S. 1983. I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah. Jakarta : Pustaka Tarbiyah.
- Alfian. 1978. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta : Gramedia.
- Alfian. 1981. Beberapa Masalah Pembaharuan Politik di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- Alfian. 1986. Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia. Jakarta : Gramedia.
- Alfian dan Sjamsuddin, N. 1988. Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- Amal, Ichlasul. 1988. Teori-teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Andrain, Charles F. 1970. Political Life and Social Change an Introduction to Political Science. Belmont : Pub. Comp. Cal. Wadswort.
- Apter, David E. 1985. Pengantar Analisa Politik. Jakarta : LP3ES.
- Babbie, Earl. 1983. The Practice of Social Research. Belmont, California : Wadswort Publishing Company.
- Budiardjo, Meriam. 1981. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta : Gramedia.
- Budiardjo, Meriam. 1982. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia.
- Dhakidae, Daniel. 1981. Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia. Jakarta : Prisma, LP3ES.
- Duverger, Maurice. 1978. Political Parties. London : Methuen & Co. Ltd.
- Duverger, Maurice. 1984. Partai Politik dan Kelompok Kepentingan. Jakarta : Bina Aksara.
- Elderveld, Samuel J. 1964. Political Parties : A Behavioral Analysis. Chicago : Rand McNally & Co.
- Emerson, Donald K. 1976. Indonesia's Elite : Political Culture and Cultural Politics. Ithaca : Cornell University Press.
- Gaffar, Afan. 1992. Javanese Voters A Case Study of Election Under A Hegemonic Party System. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Geertz, Clifford, 1963. Old Societies and New States. New York : The Free Press.

- Hofstede, W.M.F. 1971. Decision Making Process in Four West Javanese Villages. The Netherlands, Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en Naturwetenschappen. Press.
- Kahin, George McTurnan. 1970. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca and London : Cornell University Press.
- Karim, M. Rusli. 1983. Perjalanan Partai Politik di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- Karim, M. Rusli. Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru. Yogyakarta : Media Widya Mandala.
- Koentjaraningrat, R.M. 1985. Javanese Culture. Singapore : Oxford University Press.
- Liddle, R. William. Tanpa tahun. Politics and Culture in Indonesia. Tanpa kota : The Ohio State University.
- Mas' oed, Mohtar dan Colin MacAndrews. 1989. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Noer, Deliar. 1982. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta : LP3ES.